

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PATI TAHUN 2023-  
2026**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Dengan berakhirnya periode masa jabatan Kepala Daerah di Kabupaten Pati pada tahun 2022 diikuti pula dengan berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. Sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, bagi Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 harus menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Dokumen RPD selanjutnya akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai Pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Demikian pula untuk Kepala Perangkat Daerah juga harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 merupakan pedoman dan acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati (Renstra Disperkim Kabupaten Pati) 2023-2026 dimana penentuan tujuan dan sasarannya telah memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan Renstra Disperkim Kabupaten Pati, merupakan instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra disusun untuk mewujudkan target-target Indikator Kinerja yang telah disusun di dalam RPD sehingga terjadi sinergi antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tingkat Daerah.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen yang akan digunakan sebagai pedoman perencanaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan dengan memperhatikan:

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD sampai dengan tahun 2021;

3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan, tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku; dan
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Secara teknis penyusunan Renstra Disperkim Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah namun dengan dilakukan elaborasi terhadap Inmendagri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022. Secara rinci landasan hukum penyusunan Renstra Disperkim Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan standar Pelayanan Minimal;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
30. Peraturan Bupati Pati Nomor 94 Tahun 2019 tentang SOTK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
31. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1.Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Disperkim Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 adalah untuk menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023-2026 yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan Disperkim yang harus dilaksanakan oleh Disperkim Kabupaten Pati selama kurun waktu Tahun 2023–2026.

#### **1.3.2.Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Disperkim Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, yaitu:

- a. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Disperkim Kabupaten Pati yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Disperkim Kabupaten Pati yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun;
- c. Tersusunnya perencanaan jangka menengah Disperkim Kabupaten Pati yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Disperkim Kabupaten Pati;

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi uraian tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD, Sumber Daya PD, Kinerja Pelayanan PD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.

### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD, Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah dalam RPD Tahun 2023-2026, Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Jawa Tengah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Isu Strategis PD.

### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

### **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang.

### **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya.

### **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

### **BAB VIII : PENUTUP**

Bab ini memuat pernyataan penutup dari dokumen perencanaan perangkat daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pati dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam operasionalisasi organisasinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Peraturan ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

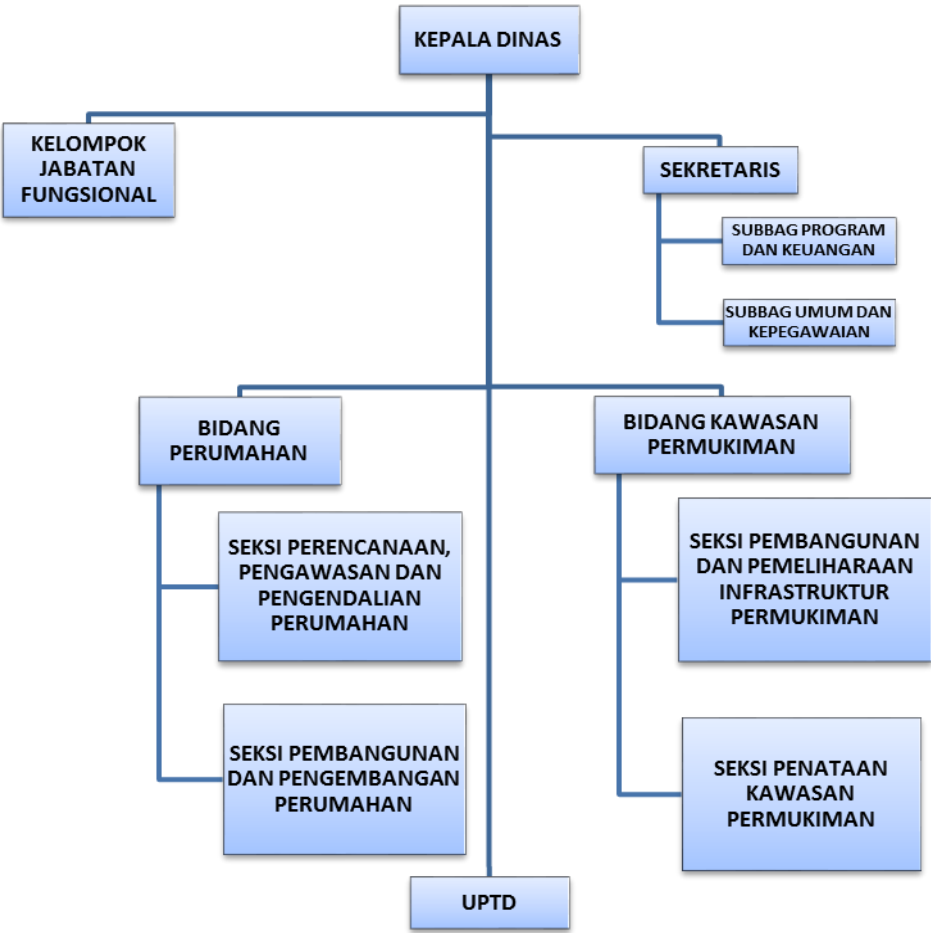
Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, dengan 2 (dua) Subbag, yaitu Subbag Program dan Keuangan dan Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perumahan, dengan 2 (dua) Seksi, yaitu Seksi Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan, dan Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

- 4. Bidang Kawasan Permukiman, dengan 2 (dua) Seksi, yaitu:  
Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman  
serta Seksi Penataan Kawasan Permukiman
- 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur kelembagaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 94 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Disperkim Kabupaten Pati





Untuk menjalankan tugasnya masing-masing unit mempunyai rincian tugas.

➤ Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman guna pedoman pelaksanaan tugas;
- c. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- d. menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan teknis urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan program urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan kegiatan di urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
- j. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman sesuai ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;
- k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;



- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis;

➤ Sekretariat

Tugas : menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan dinas.

Fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Subbidang Umum dan Kepegawaian, serta Subbidang Program dan Keuangan;
- pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

➤ Bidang Perumahan

Tugas : menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Perencanaan, Pengawasan, Pengendalian Perumahan, serta kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

Fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan serta kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
- pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan serta kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan serta kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Bidang Kawasan Permukiman

Tugas : perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman serta kegiatan Penataan Kawasan Permukiman.

- Fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Permukiman serta kegiatan Penataan Kawasan Permukiman;
  - b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman serta kegiatan Penataan Kawasan Permukiman untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
  - c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman serta kegiatan Penataan Kawasan Permukiman; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam hal penyelenggaraan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki ruang lingkup kewenangan sebagai berikut :

Tabel 2.1  
 Urusan Konkuren  
 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah  
 Daerah Kabupaten Berdasarkan UU 23 tahun 2014

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten
1	2	3	4	5
1	Perumahan	a. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana nasional; c. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Pusat; d. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi MBR.	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi; b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota; b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2	Kawasan Permukiman	a. Penetapan sistem kawasan permukiman; b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih.	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.; b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	-	-	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah

				kabupaten/kota.
4	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman.	Penyelenggaraan PSU permukiman.	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU Tingkat kemampuan besar	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU Tingkat kemampuan menengah	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU Tingkat kemampuan kecil

*Sumber : Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014*

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati. Data Kepegawaian sampai dengan Desember 2021 berjumlah 46 orang terdiri dari PNS sejumlah 25 orang, Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 21 orang. Berdasarkan jenis kelamin, dari jumlah PNS sebanyak 25 orang terdiri dari 16 laki-laki dan 9 perempuan. Jumlah pejabat struktural 11 orang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 6 perempuan. Lebih lanjut, khusus untuk komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut :

Tabel 2.2  
Jumlah PNS Disperkim Kabupaten Pati  
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Kepala Dinas			Sekretariat			Bidang Perumahan			Bidang Kawasan Permukiman			UPTD Rusun		
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
1	SD	-			1		1									
2	SMP															
3	SMA				2		2	1		1	3		3	1		1
4	D1/ D2/ D3				1	1	2									
5	D4															
6	S1				1	1	2	2		2	0	2	2	1	1	2
7	S2	1		1		2	2	2	1	3		1	1			
8	S3															
Jumlah		1		1	5	4	9	5	1	6	3	3	6	2	1	3
		1						6			6			3		
		25														

Sumber : Disperkim 2022

Tabel 2.3  
Jumlah PNS Disperkim Kabupaten Pati  
Menurut Golongan

No	Golongan	Kepala Dinas			Sekretariat			Bidang Perumahan			Bidang Kawasan Permukiman			UPT Rusun		
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
1	I															
2	II				2		2	1		1	3		3	1		1
3	III				3	3	4	2	1	3		2	2	1	1	2
4	IV			1		1	1	2		2		1	1			
Jumlah		1		1	3	4	7	5	1	6	3	3	6	2	1	3
		1			9			6			6			3		
		25														

Sumber : Disperkim 2022

Tabel 2.4  
Jumlah Pejabat Struktural Disperkim Kabupaten Pati  
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Kepala Dinas			Sekretariat			Bidang Perumahan			Bidang Kawasan Permukiman			UPT Rusun		
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
1	D3/D4				1		1									
2	S1					1	1					2	2	1		1
3	S2	1		1		1	1	2	1	3		1	1			
4	S3															
Jumlah		1		1	1	2	3	2	1	3		3	3	1		1
		1			3			3			3			1		
		11														

Sumber : Disperkim 2022

Tabel 2.5  
Jumlah Pejabat Struktural Disperkim Kabupaten Pati  
Menurut Golongan

No	Golongan	Kepala Dinas			Sekretariat			Bidang Perumahan			Bidang Kawasan Permukiman			UPT Rusun		
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
1	III				1	1	2		1	1		2	2	1		
2	IV	1		1		1	1	2		2		1	1			
Jumlah		1		1	1	2	3	2	1	3		3	3	1		1
		1			3			3			3			1		
		11														

Sumber : Disperkim 2022

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih membutuhkan pengisian personil pada jabatan fungsional umum dan tertentu sesuai dengan hasil analisa jabatan untuk meningkatkan kinerja organisasi sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6  
Data Kebutuhan Pegawai Sesuai Peta Jabatan  
Disperkim Kabupaten Pati

No	Nama Jabatan	Kebutuhan	Bezetting	Kekurangan
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	1	1	0
2	Bendahara	1	1	0
3	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	1	0
4	Pengolah Data Laporan Keuangan	1	0	1
5	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	0	1
6	Pengadministrasi Keuangan	1	1	0
7	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	0	1
8	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	1	0	1
9	JF Pranata Komputer Penyelia	1	0	1
10	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	1	1	0
11	Analisis Tata Usaha	1	0	1
12	Pengelola Barang Milik Negara	1	0	1
13	Pengelola Kepegawaian	1	0	1
14	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	1	0	1
15	Pengadministrasi Umum	1	1	0
16	Pramu Bakti	1	1	0
17	Analisis Bangunan dan Perumahan	3	1	2
18	Analisis Persiapan Lahan	2	0	2
19	Penilai Properti	1	0	1
20	Juru Survei Permukiman Perumahan	3	1	2
21	Pengadministrasi Umum	1	0	1
22	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	2	0	2
23	Pengadministrasi IMB Gedung atau Bangunan	1	0	1
24	Pengadministrasi Umum	1	1	0
25	Analisis Pembukaan Lahan	3	0	3
26	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	2	0	2
27	Juru Survei Permukiman Perumahan	2	0	2

28	Pengadministrasi Umum	1	1	0
29	Penyusun Rencana Konservasi Kawasan	2	0	2
30	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan	2	0	2
31	Pengelola Perumahan dan Permukiman	1	0	1
32	Juru Survei Permukiman Perumahan	2	1	1
33	Pengadministrasi Umum	1	0	1
34	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	1	0
35	Pengelola Bangunan Gedung	1	0	1
36	Pengadministrasi Umum	1	0	1
37	Teknisi Listrik, Telepon, AC, dan Lift	2	0	2
38	Juru Pungut Retribusi	1	1	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>52</b>	<b>14</b>	<b>38</b>

Sumber : Disperkim 2022

Kebutuhan akan diklat fungsional dan diklat teknis untuk meningkatkan kompetensi pegawai dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7  
Data Usulan Pengembangan Kompetensi Pegawai  
Disperkim Kabupaten Pati

No.	Jenis Pelatihan	Jumlah Usulan
1	2	3
1	Diklat/Pelatihan Manajerial	4
2	Diklat/Pelatihan Fungsional	2
3	Diklat/Pelatihan Teknis	27
	<b>Jumlah</b>	33

Sumber : Disperkim 2022

b. Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana yang dimaksud meliputi sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Pati sebagai peralatan kerja dinas dan sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Pati sebagai infrastruktur publik. Kondisi sarana prasarana sebagai alat kerja dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8  
Data Sarana dan Prasarana Disperkim

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	pompa lainnya (dst)	1	v		
2	Station Wagon	4	v		
3	Station Wagon	2		v	



4	Pick Up	2	√		
5	Sepeda Motor	12	√		
6	Sepeda Motor	2		√	
7	Independence Meter	1	√		
8	Global Positioning System	1	√		
9	Lemari Besi/Metal	10	√		
10	Lemari Kayu	2	√		
11	Rak Besi	6	√		
12	Filing Cabinet Besi	18	√		
13	CCTV - Camera Control Television System	1	√		
14	Mesin Absensi	2	√		
15	Papan Nama Instansi	2	√		
16	Papan Pengumuman	1	√		
17	Meja Kerja Kayu	11	√		
18	Kursi Besi/Metal	2	√		
19	Kursi Kayu	11	√		
20	Meja Rapat	5	√		
21	Meja 1/2 Biro	19	√		
22	Kursi Rapat	9	√		
23	Kursi Putar	1	√		
24	Kursi Lipat	162	√		
25	Mesin Pemotong Rumput	2	√		
26	A.C. Split	11	√		
27	Kipas Angin	6	√		
28	Televisi	2	√		
29	Sound System	1	√		
30	Tangga Aluminium	1	√		
31	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	√		
32	Meja Kerja Pejabat Eselon III	9	√		
33	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	21	√		
34	Meja Tamu Biasa	1	√		
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	√		
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	√		
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	√		
38	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	19	√		
39	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	√		
40	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	√		
41	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	√		
42	Microphone/Wireless MIC	1	√		
43	peralatan studio audio lainnya (dst) - cctv	2	√		
44	Layar Film/Projector	1	√		
45	Facsimile	1	√		
46	P.C Unit	4	√		
47	Lap Top	12	√		
48	Note Book	10	√		

49	Printer (Peralatan Personal Komputer)	18	√		
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2		√	
50	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	√		
51	External/ Portable Hardisk	1	√		

Sumber : Disperkim 2022

Sarana prasarana dan utilitas di perumahan yang telah diserahkan dan permukiman yang berupa infrastruktur publik yang menjadi tanggung jawab pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati meliputi tanah, tanah, bangunan/ gedung, jalan/ ruas jalan, saluran air/ drainage, instalasi air bersih, gardu/ tiang/ instalasi/ jaringan listrik dan infrastruktur lain dapat dilihat dalam tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9  
Data Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman  
Yang Telah Menjadi Aset Kabupaten Pati

No.	Jenis Barang	Luas/m <sup>2</sup>	Letak/ Alamat
1	Jalan Kabupaten Lokal	1.848	Kec. Pati
2	Jalan Kabupaten Lokal	5.588	BTN Sukoharjo
3	Jalan Kabupaten Lokal	7.750	PERUMAHAN RENDOLE INDAH 1
4	Jalan Kabupaten Lokal	12.093	Lingkungan BTN Gembleb
5	Jalan Kabupaten Lokal	5.330	PERUM. RENDOLE INDAH 2
6	Jalan Kabupaten Lokal	2.117	Lingkungan RSS Sidokerto
7	Jalan Kabupaten Lokal	6.428	Lingkungan Puri Baru Permai 1
8	Jalan Kabupaten Lokal	9.365	Lingkungan BTN WINONG
9	Jalan Kabupaten Lokal	808	Lingkungan Puri Baru Permai 2
10	Jalan Kabupaten Lokal	17.175	Lingkungan Perumahan Kutoharjo
11	Jalan Kabupaten Lokal	5.148	Perumahan Rendole Indah 3
12	Jalan Kabupaten Lokal	1.445	Lingkungan GWIB WINONG 1
13	Jalan Kabupaten Lokal	1.835	Lingkungan perum GWIB WINONG 2
14	Jalan Kabupaten Lokal	2.578	Lingkungan perum kebon bibit buah 1
15	Jalan Kabupaten Lokal	1.601	Lingkungan perum Banyuurip
16	Jalan Kabupaten Lokal	8.859	Ling perum gunung bedah permai
17	Jalan Kabupaten Lokal	5.012	Ling. PERUMDA SUKOHARJO
18	Jalan Kabupaten Lokal	933	KOMPLEK PERUM. WINONG , DESA WINONG KEC. PATI KAB. PATI
19	Jalan Kabupaten Lain-lain	6.218	Komplek perumahan KPR BTN Puring Permai Desa Tambaharjo dan Desa Mulyoharjo Kecamatan Pati Kab Pati
20	Jalan Kabupaten Lain-lain	7.824	RSS Sukoharjo
21	Jalan Desa	9.508	Kelurahan Kalidoro
22	Jalan Desa	8.907	KEL. PARENGGAN
23	Jalan Desa	11.298	KEL. PATI WETAN
24	Jalan Desa	20.757	KEL. PATI LOR KEC. PATI
25	Jalan Desa	30.483	KEL. PATI KIDUL KEC PATI
26	Jalan Khusus Kompleks	827	Perumahan Indah Residence Desa Mulyoharjo Kec. Pati Kab. Pati
27	Jalan Khusus Kompleks	505	PERUM. CLUSTER HAMPARAN RENDOLE ASRI DESA MUKTIHARJO KEC. MARGOREJO
28	Jalan Khusus Kompleks	1.250	PERUM. PURINATA DESA NGEPUKROJOKEC. PATI
29	Jalan Khusus Kompleks	3.217	PERUM TAYU KULON SEJAHTERA DESA TAYU KULON KEC. TAYU

30	Jalan Khusus Kompleks	2.535	KOMPLEK PERUM PONDOK WIJAYA KUSUMA GEMBLEB, DESA KUTOHARJO
31	Jalan Khusus Kompleks	1.426	KOMPLEK PERUMAHAN GUNUNG BEDAH PERMAI DESA PEGANDAN KEC. MARGOREJO
32	Jalan Khusus Kompleks	9.146	Perum. Perumnas Pesona Griya Sidokerto Desa Sidokerto Kec. Pati
33	Jalan Khusus Kompleks	4.499	Perumnas Winong Desa Winong Kec. Pati
34	Jalan Khusus Kompleks	907	perum HMB desa mulyoharjo kec pati
35	Jalan Khusus Kompleks	20.211	Perumahan Permata Keluarga Residence Desa Margorejo Kec. Margorejo
36	Jalan Khusus Kompleks	8.010	Perumahan Taman Mutiara Persada Desa Wangunrejo Kec. Margorejo
37	Jalan Khusus Kompleks	545	Perumahan Hamparan Kajar Residence I Desa Kajar Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati
38	Jembatan Pada Jalan Desa	362	KEL. PARENGGAN KEC. PATI KAB. PATI
39	Jembatan Pada Jalan Khusus Kompleks	5	Perumahan Taman Mutiara Persada
40	Jembatan Khusus Lain-lain	14	Lorong Makam Mbah Sasi Rt 1 Lingkungan Getaan Kel. Pati Wetan Kec. Pati
41	Saluran Pasang Tertutup/Terowongan	106	Komplek Perumahan KPR BTN Puring Permai Desa Tambaharjo dan Desa Mulyoharjo Kecamatan Pati Kab Pati
42	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa)		Perumahan Gunung Bedah Permai Ds. Pegandan Kec. Margorejo
43	Saluran Drainage	2.671	Perumahan Kutoharjo (Depan Alugoro) Ds. Kutoharjo Kec. Pati
44	Saluran Drainage		Perumahan Rendole Indah Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
45	Saluran Drainage		Perumahan Gunung Bedah Permai Ds. Pegandan Kec. Margorejo
46	Saluran Drainage		Perumahan Griya Winong Indah Baru 2 Ds. Winong Kec. Pati
47	Saluran Drainage		Perumahan Baru Permai 2 Ds. Puri Kec. Pati
48	Saluran Drainage	17	Perumahan Kebon Bibit Buah Ds. Sidokerto Kec. Pati
49	Saluran Drainage	3.779	Perumahan Puri Baru Permai Ds. Puri Kec. Pati
50	Saluran Drainage	3.759	Perumahan Rendole Indah Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
51	Saluran Drainage	825	Perumahan GWIB 1 Ds. Winong Kec. Pati
52	Saluran Drainage		KPR BTN Pondok Wijaya Kusuma Gembab Desa Kutoharjo Kec. Pati

53	Saluran Drainage	162	Kec. Pati
54	Saluran Drainage	162	Kelurahan Pati Wetan Kec. Pati
55	Saluran Drainage	2.898	Kelurahan Pati Kidul Kec. Pati
56	Saluran Drainage	200	kelurahan kalidoro
57	Saluran Drainage	4.017	Komplek Perumahan KPR BTN Puring Permai Desa Tambaharjo dan Desa Mulyoharjo Kecamatan Pati Kab Pati
58	Saluran Drainage	203	PERUM. CLUSTER HAMPARAN RENDOLE ASRI DESA MUKTIHARJO KEC. MARGOREJO
59	Saluran Drainage	703	PERUM. INDAH RESIDANCE DESA MULYOHARJO KEC. PATI KAB. PATI
60	Saluran Drainage	325	PERUM. PURINATA DESA NGEPUKROJO KEC. PATI
61	Saluran Drainage	1.955	PERUM. TAYU KULON SEJAHTERA DESA TAYU KULON KEC. TAYU
62	Saluran Drainage	77	Kp.Kaborongan RT.001 RW.001
63	Saluran Drainage	100	Kp. Saliyan RT 004/ RW.002
64	Saluran Drainage	100	Kp. Randukuning RT.008/ RW.003
65	Saluran Drainage	239	Komplek Perum. Wisma Giri Asri Desa Sukoharjo Kec. Margorejo, Kab. PATI
66	Saluran Drainage	452	Jl. Kepodang Lingkungan Kranggan Pati Kidul
67	Saluran Drainage	291	dk kaborongan
68	Saluran Drainage	6	Gang RT.1 dan RT.2/ RW. I
69	Saluran Drainage	510	KOMPLEK PERUMAHAN SUKOHARJO INDAH DS. SUKOHARJO KEC. MARGOREJO
70	Saluran Drainage	52	Perumahan Hamparan Kajar Residence I Desa Kajar Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati
71	Saluran Drainage	12.513	Perumnas Winong Desa Winong Kec. Pati
72	Saluran Drainage	252.962	Perumnas Pesona Griya Sidokerto Desa Sidokerto Kec. Pati
73	Saluran Drainage	303	Perumahan Permata Keluarga Residence Desa Margorejo Kec. Margorejo
74	Saluran Drainage	129	Perum. HMB Mulyoharjo Kec. Pati
75	Saluran Drainage	84	Kelurahan Pati Lor
76	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Lain-lain	1	Talud Perumahan Taman Mutiara Persada
77	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Lain-lain	47	Perumahan Permata Keluarga Residence Desa Margorejo Kec. Margorejo
78	Krib Pengaman Sungai/Pantai	75	Perumahan Permata Keluarga Residence Desa Margorejo Kec. Margorejo

79	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1	Perumahan Griya Winong Indah Baru 2 Ds. Winong Kec. Pati
80	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1	Perumahan Baru Permai 2 Ds. Puri Kec. Pati
81	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	38	Perumahan Kebon Bibit Buah Ds. Sidokerto Kec. Pati
82	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1	Perumahan Rendole Indah Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
83	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	180	Komplek Perumahan KPR BTN Puring Permai Desa Tambaharjo dan Desa Mulyoharjo Kecamatan Pati Kab Pati
84	Bangunan Pemecah Gelombang	1	PERUM. PURINATA DESA NGEPUNGREJO KEC. PATI
85	Sumur Artetis	32	Perumahan Rendole Indah Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
86	Sumur Artetis	1	Perumahan Gunung Bedah Permai Ds. Pegandan Kec. Margorejo
87	Bangunan Pengambilan Dari Sumber Air	1	Perumahan Permata Keluarga Residence Desa Margorejo Kec. Margorejo
88	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	84	Perumahan Permata Keluarga Residence Desa Margorejo Kec. Margorejo
89	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	15	Perumahan Permata Keluarga Residence Desa Margorejo Kec. Margorejo
90	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	8	Perumahan Taman Mutiara Persada Desa Wangunrejo Kec Margorejo
91	Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah	133	Jalan Amarta No. 125 Kelurahan Parenggan
92	Sumur Gali (SGL)	1	Perumahan Rendole Indah Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
93	Sumur Resapan	1	Ds. Bumiharjo Juwana
94	Sumur Resapan	1	Perumahan Winong Ds. Winong Kec. Pati
95	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-lain	1	Rusunawa Kec. Juwana
96	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 1 KVA	8	Komplek Perumahan KPR BTN Puring Permai Desa Tambaharjo dan Desa Mulyoharjo Kecamatan Pati Kab Pati
97	Jaringan Transmisi Lain-lain	1	Disperindag Jalan P.Sudirman Km.3 Pati
98	Jaringan Transmisi Lain-lain	1	Komplek Perumahan KPR BTN Puring Permai Desa Tambaharjo dan Desa Mulyoharjo Kecamatan Pati Kab Pati
99	Jaringan Transmisi Lain-lain	1	JARINGAN LISTRIK PERUM. CLUSTER HAMPARAN RENDOLE ASRI DESA MUKTIHARJO KEC. MARGOREJO
100	Jaringan Transmisi Lain-lain	1	PERUM. TAYU KULON SEJAHTERA

			DESA TAYU KULON KEC. TAYU
101	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	Perumahan Winong Ds. Winong Kec. Pati
102	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	Perumahan Kutoharjo (Depan Alugoro) Ds. Kutoharjo Kec. Pati
103	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	Perumahan Gunung Bedah Permai Ds. Pegandan Kec. Margorejo
104	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	Perumahan Griya Winong Indah Baru 2 Ds. Winong Kec. Pati
105	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	Perumahan Baru Permai 2 Ds. Puri Kec. Pati
106	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	Perumahan Rendole Indah 2 Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
107	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	Perumahan Kebon Bibit Buah Ds. Sidokerto Kec. Pati
108	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	Perumahan GWIB 1 Ds. Winong Kec. Pati
109	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	DISPERINDAG Kab. Pati Jl. P. Sudirman km. 3 Pati dan Pasar Daerah
110	Jaringan Distribusi Lain-lain	0	PERUM. CLUSTER HAMPARAN RENDOLE ASRI DESA MUKTIHARJO KEC. MARGOREJO
111	Jaringan Distribusi Lain-lain	10	TIANG LISTRIK BETON PERUM. INDAH RESIDANCE DESA MULYOHARJO KEC. PATI KAB. PATI
112	Jaringan Distribusi Lain-lain	6	PERUM PURINATA DESA NGEPUNGREJO KEC. PATI
113	Jaringan Distribusi Lain-lain		KOMPLEK PERUM. PONDOK WIJAYA KUSUMA GEMBLEB DESA KUTOHARJO KEC. PATI
114	Jaringan Distribusi Lain-lain	31	Perum. Perumnas Pesona Griya Sidokerto Desa Sidokerto Kec. Pati
115	Jaringan Distribusi Lain-lain	104	Perumahan Hamparan Kajar Residence I Desa Kajar Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati
116	Jaringan Distribusi Lain-lain	81	PERUMAHAN TAMAN MUTIARA PERSADA DESA WANGUNREJO KEC MARGOREJO
117	Jaringan Distribusi Lain-lain		Perumahan Permata Keluarga Residence Desa Margorejo Kec. Margorejo
118	Jaringan Distribusi Lain-lain	232	PERUM HMB desa mulyoharjo kec pati
119	Jaringan Distribusi Lain-lain	7	PERUM TAMAN MUTIARA PERSADA DESA WANGUNREJO KEC MARGOREJO

Sumber : Disperkim 2022



2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman selama periode tahun 2018 – 2021 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.10  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PATI  
TAHUN 2018-2021

N o.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targ et SP M	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
A	Tujuan																
1	Persentase kawasan kumuh				0,80 %	0,71 %	0,62 %	0,53 %	0,44 %	0,50 %	0,26 %	0,24 %	0,12 %	138 %	164 %	162 %	169 %
2	Persentase Capaian Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni				2,10 %	2,87 %	2,92 %	2,94 %	2,94 %	2,11 %	4,70 %	3,52 %	3,17 %	100,5 2%	164 %	120 %	107,8 2%
B	Sasaran																
1	Persentase pengurangan kawasan kumuh				0,80 %	0,71 %	0,62 %	0,53 %	0,44 %	0,50 %	0,26 %	0,24 %	0,12%	138%	164 %	162 %	169%
2	Persentase pengurangan rumah tidak layak huni(RTLH) di kawasan kumuh				49%	69,5 3%	79,6 8%	89,8 4%	100 %	49 %	69,5 3%	69,5 7%	116,7 9%	79,73 %	69,5 3%	87,3 1%	129 %
3	Persentase pengurangan rumah tidak layak huni(RTLH) di luar kawasan kumuh				4,67 %	11,7 7%	20,51 %	29,3 1%	38,1 1%	3,75 %	10,0 4%	20,3 2%	30,96 %	80,26 %	85,3 0%	99,0 7%	105,6 2%
4	Persentase pengurangan backlog				0,64 %	1,28 %	1,92 %	2,56 %	3,20 %	0,97 %	1,86 %	2,40 %	2,68 %	152 %	145 %	125 %	105 %
C	SPM																
1	Persentase jumlah unit rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Presentase jumlah unit rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/ Kota			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	200 %	300 %	400 %	500 %
3	Persentase pengurangan backlog				0,64 %	1,28 %	1,92 %	2,56 %	3,20 %	0,97 %	1,86 %	2,40 %	2,679 %	152 %	145 %	125 %	104,64 %

<b>C</b>	<b>SPM</b>																
1	Persentase jumlah unit rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase jumlah unit rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/ Kota				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Disperkim 2022

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan diatas dapat diketahui tingkat keberhasilan dari pencapaian indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Capaian pada indikator kinerja tujuan Persentase kawasan kumuh dan indikator kinerja Persentase Capaian Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Demikian pula capaian kinerja pada masing-masing sasaran menunjukkan capaian yang tinggi setiap tahun. Adapun capaian pada indikator kinerja Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) juga menunjukkan tingkat capaian yang tinggi. Pencapaian ini lebih dikarenakan adanya kerjasama maupun komitmen yang tinggi dari semua pihak dalam upaya mendukung pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pati khususnya dalam bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman.

Penanganan kawasan kumuh dapat dikategorikan sangat berhasil dimana luas kawasan kumuh di Kabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati Pati Nomor 050/1783/tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pati Nomor 050/4852 Tahun 2014 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pati adalah sebesar 181,58 Ha yang tersebar di 7 kecamatan yaitu Kecamatan Pati, Tayu, Juwana, Kayen, Batangan, Dukuhseti, dan Margoyoso. Hingga tahun 2021 luas kawasan kumuh masih tersisa 23,47 Ha yaitu di Desa Banyutowo (3,69 Ha), Puncel (10,36 Ha), dan Kayen (9,42 Ha). Realisasi penanganan kawasan kumuh pada akhir 2021 sebagaimana tabel II.10 berikut :

Tabel 2.11  
 Realisasi Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pati

No	Nama Lokasi	Lingkup Administratif			Kekumu Han	Luas	Penangan an	Sisa	Keterangan
		Rt/Rw	Desa	Kec	Tingkat/ Kategori				
1	Bajo	RT 1,2,4/IV	Bajomuly	Juwana	Sedang	21,01	21,01	-	sudah

		dan RW I	o						ditangani, menjadi tidak kumuh
2	Pabrik Padi	RT 1,2,3/ III	Kudukeras	Juwana	Sedang	10,50	10,50	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
3	Bendarwetan	RT1/I dan RT 1,2,3/ V	Bendar	Juwana	sedang	9,69	9,69	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
4	Kenginan	RT5/I dan RT6,7/III	Growong lor	Juwana	sedang	3,82	3,82	-	Sudah ditangani, masih menyisakan RTLH
5	Kebonsawahan RT1/I	RT 1/ I	Kebonsa wahan	Juwana	ringan	0,57	0,57	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
6	Kebonsawahan RT2/I	RT 2/ I	Kebonsa wahan	Juwana	ringan	0,71	0,71	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
7	Kebonsawahan RT3,4/I	RT 3,4/ I	Kebonsa wahan	Juwana	ringan	1,04	1,04	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
8	Kaumankulon RT1,2/3	RT1,2/III	Kauman	Juwana	sedang	1,92	1,92	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
9	Kaumankulon RT3,4/3	RT3,4/III	Kauman	Juwana	sedang	1,05	1,05	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
10	Kaumanwetan RT2,3/I	RT2,3/I	Kauman	Juwana	sedang	0,40	0,40	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
11	Kaumanwetan RT3,4/I	RT3,4/I	Kauman	Juwana	sedang	1,11	1,11	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
12	Pajeksan RT1/I	RT1/I	Pajeksan	Juwana	sedang	1,28	1,28	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
13	Kemasan	RT 1,2/II	Pajeksan	Juwana	sedang	1,14	1,14	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
14	Kliten	RT 8,9/III	Doropay ung	Juwana	sedang	4,09	4,09	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
15	Bulumanislort RT 3,4/4	RT 3,4/IV	Bulumanis lor	Margoyoso	sedang	1,36	1,36	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
16	Bulumanislort RT 3 /2	RT 3 /II	Bulumanis lor	Margoyoso	sedang	0,70	0,70	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
17	Bulumanislort RT 1/1	RT 1/1	Bulumanis lor	Margoyoso	sedang	0,24	0,24	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
18	Bulumaniskidul RT 1/3	RT 1/III	Bulumanis kidul	Margoyoso	sedang	2,21	2,21	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
19	Bulumaniskidul RT 5/2	RT 5/II	Bulumanis kidul	Margoyoso	sedang	2,17	2,17	-	sudah ditangani, menjadi tidak

									kumuh
20	Sungaisat	RT 3/IV Dan RT2/VI	Cebolek Kidul	Margoyoso	sedang	2,53	2,53	-	Sudah ditangani, masih menyisakan RTLH
21	Menak	RT 1/II Dan 2/III	Cebolek Kidul	Margoyoso	sedang	2,83	2,83	-	Sudah ditangani, masih menyisakan RTLH
22	Sapu	RT 1/V	Cebolek Kidul	Margoyoso	sedang	0,56	0,56	-	Sudah ditangani, masih menyisakan RTLH
23	Sekarjalak RT 2/II	RT 2/II	Sekarjalak	Margoyoso	sedang	0,43	0,43	-	Sudah ditangani, masih menyisakan RTLH
24	Sekarjalak RT 3/II	RT 3/II	Sekarjalak	Margoyoso	sedang	1,32	1,32	-	Sudah ditangani, masih menyisakan RTLH
25	Sleko RT 2/ I	RT 2/ I	Semampir	Pati	Ringan	3,65	3,65	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
26	Sleko RT 8/ II	RT 8/ II	Semampir	Pati	sedang	2,02	2,02	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
27	Puri Balokan	RT 2/V	Puri	Pati	sedang	5,52	5,52	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
28	Puri Kacangan	RT 4/ IV	Puri	Pati	Ringan	1,08	1,08	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
29	Puri Eliem (Lawet)	RT 2/VII	Puri	Pati	sedang	3,10	3,10	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
30	Winong Wetan RT 2,4/2	RT 2,4/II	Winong	Pati	sedang	4,25	4,25	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
31	Winong Kulon RT 11,12,13/3	RT 11,12,13/III	Winong	Pati	Sedang	7,60	7,60	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
32	Panjunan RT 16,17,20/3	RT 16,17,20/III	Panjunan	Pati	Ringan	7,82	7,82	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
33	Sambiroto Wetan	RT 10/I	Sambiroto	Tayu	Sedang	3,38	3,38	-	Sudah ditangani, masih menyisakan RTLH
34	Sambiroto RT 9/I	RT 9/I	Sambiroto	Tayu	Sedang	2,64	2,64	-	Sudah ditangani, masih menyisakan RTLH
35	Sambiroto TPI	RT 5/I	Sambiroto	Tayu	Sedang	4,42	4,42	-	Sudah ditangani, masih menyisakan RTLH
36	Pecingan	RT 6/I	Sambiroto	Tayu	Sedang	4,97	4,97	-	Sudah ditangani, masih

									menyisakan RTLH
37	Widengan	RT 1,2,3/VII	Margomulyo	Tayu	Sedang	3,42	3,42	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
38	Mbelah	RT 1,2,3/Idan RT 1,2,3/II	Margomulyo	Tayu	sedang	9,40	9,40	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
39	Randugunting	RT 1,2,4/IV	Pecangaaan	Batangan	Berat	7,08	7,08		Sudah ditangani, menjadi kumuh ringan
40	Bulak Kidul	RT 5/Idan RT 2,5/II	Banyuto wo	Dukuh seti	Berat	0,96	-	0,96	Sudah ditangani, menjadi kumuh ringan
41	Klop	RT 7/II	Banyuto wo	Dukuh seti	Berat	0,26	0,26	-	sudah ditangani, menjadi tidak kumuh
42	Purbomencil	RT 6/I	Banyuto wo	Dukuh seti	Berat	10,09	7,36	2,73	Sudah ditangani, menjadi kumuh ringan
43	Puncel Tambak	RT 1,2,4/Idan RT 4/VII	Puncel	Dukuh seti	Berat	15,09	4,73	10,36	Sudah ditangani, menjadi kumuh ringan
44	Buloh	RT 1,4,5/VI	Kayen	Kayen	Sedang	12,14	2,72	9,42	Sudah ditangani, menjadi kumuh ringan
	<b>JUMLAH</b>					<b>181,58</b>	<b>158,11</b>	<b>23,47</b>	

Sumber : Disperkim 2022

Data diatas menunjukkan telah terdapat pengurangan kumuh yang cukup signifikan, yaitu dari 22 lokasi Desa berkurang menjadi 4 (empat) lokasi Desa yang masih berkategori kumuh.

Adapun untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Kabupaten Pati dilakukan dengan upaya penambahan jumlah rumah baru untuk mengurangi *backlog* serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Pada akhir 2021 jumlah RTLH telah menunjukkan penurunan dari data awal sebanyak 33.278 unit menjadi 21.056 unit yang tersebar baik di kawasan kumuh maupun di luar kawasan kumuh. Berkurangnya jumlah RTLH di Kabupaten Pati merupakan hasil penanganan dari berbagai sumber dana baik APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN (BSPS), DAK serta sumber lainnya. Data RTLH di Kabupaten Pati sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.12

DATA JUMLAH RUMAH BERDASARKAN KONDISI DI KABUPATEN PATI  
TAHUN 2019-2021

No.	Kecamatan	2019		2020		2021	
		Layak Huni	Tidak Layak Huni	Layak Huni	Tidak Layak Huni	Layak Huni	Tidak Layak Huni
1	Sukolilo	23.245	2.078	23.462	1.861	23.557	1.766
2	Kayen	8.553	3.325	18.969	2.909	19.171	2.707

3	Tambakromo	13.443	1.979	13.713	1.709	13.893	1.529
4	Winong	16.595	1.799	16.795	1.599	16.989	1.405
5	Pucakwangi	12.424	807	12.600	631	12.758	437
6	Jaken	9.850	3.944	10.054	3.740	10.270	3.524
7	Batangan	12.910	763	13.040	633	13.170	503
8	Juwana	23.243	1.522	23.406	1.359	23.717	1.048
9	Jakenan	13.925	1.583	14.191	1.317	14.350	1.158
10	Pati	27.784	543	27.894	433	28.045	282
11	Gabus	17.144	1.028	17.428	744	17.654	518
12	Margorejo	17.433	246	17.482	197	17.611	68
13	Gembong	12.882	338	13.029	191	13.124	96
14	Tlogowungu	14.158	1.147	14.233	1.072	14.336	969
15	Wedarijaksa	16.887	1.015	16.976	926	17.134	768
16	Margoyoso	17.893	1.391	18.008	1.276	18.240	1.044
17	Gunungwungkal	10.245	548	10.324	469	10.421	372
18	Cluwak	13.520	474	13.562	432	13.723	271
19	Tayu	18.282	698	18.407	573	18.590	390
20	Dukuhseti	16.564	1.426	16.806	1.184	17.106	884
21	Trangkil	16.224	1.520	16.261	1.483	16.463	1.281
Jumlah		343,204	28.174	346.640	24.738	350.322	21.056

Sumber : Disperkim 2022

c. Pencapaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Review terhadap pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diperlukan guna melengkapi evaluasi capaian kinerja.

Kinerja layanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari sisi pengelolaan pendanaannya, dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 2.12 b  
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PATI

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Pengembangan Perumahan	3.700.186.050	4.658.415.500	5.847.770.150	-	3.666.861.474	4.606.672.322	5.810.819.350	-	99,10%	98,89%	99,37%	-	26%	26%
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	-	1.020.913.000	1.276.472.600	-	-	1.014.238.000	1.269.179.450	-		99,35%	99,43%	-	25%	25%
3	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	80.000.000	41.000.000	52.485.000	-	79.957.425	40.975.000	52.433.400	-	99,95%	99,94%	99,90%	-	28%	28%
4	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/social	-	25.000.000	4.470.400	-	-	21.935.000	4.464.650	-		87,74%	99,87%	-	-82%	-80%
5	Program Pengembangan Perumahan	-	-	-	50.970.350	-	-	-	47.241.500	-	-	-	92,68%	100%	100%
6	Program Kawasan Permukiman	-	-	-	2.870.508.000	-	-	-	2.865.493.900	-	-	-	99,83%	100%	100%
7	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	-	-	-	1.439.378.000	-	-	-	1.430.250.850	-	-	-	99,37%	100%	100%
8	Program Peningkatan Prasarana dan Utilitas Umum (PSU)	-	-	-	1.548.866.300	-	-	-	1.543.073.950	-	-	-	99,63%	100%	100%

Sumber : Disperkim 2022



Dari tabel di atas diketahui bahwa rasio antara realisasi dan anggaran selama tahun 2018 sampai dengan 2020 pada Program Pengembangan Perumahan, Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dan Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial dapat dikatakan sangat baik (rata-rata diatas 90%). Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran pada Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh serta Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 juga sangat baik (rata-rata lebih dari 90%).

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada Renstra Kementrian PUPR Tahun 2020 – 2024 salah satu tujuannya adalah peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living dengan pemanfaatan dan pengelolaan partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan sasaran meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau. Sedangkan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, salah satu tujuannya adalah meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas dengan sasaran meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan dan meningkatnya kualitas kawasan permukiman.

Hasil analisis terhadap Renstra Kementrian PUPR Tahun 2020 – 2024 dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada empat tahun mendatang menurut bidang teknisnya adalah :

1. Tantangan Bidang Perumahan :
  - a. Trend pembangunan yang tidak ramah lingkungan, yang diindikasikan dengan adanya alih fungsi lahan
  - b. Akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan masih belum sesuai harapan
  - c. Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan perumahan dan permukiman, berikut infrastrukturnya
  - d. Iklim usaha pembangunan perumahan masih belum dapat memaksimalkan seluruh potensi
  - e. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat terkait terbitnya aturan LSD berpotensi merubah luasan alokasi lahan yg diperuntukkan perumahan dan permukiman

- f. Dampak bencana alam yang sulit diprediksi terhadap kepastian kuantitas dan kualitasnya guna penentuan alokasi dan kegiatan yang harus segera ditangani.

Adapun peluang pada bidang ini diantaranya adalah :

- a. Kebutuhan rumah tinggal dan animo masyarakat terhadap penyediaan perumahan sangat tinggi (*backlog*)
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perumahan
- c. Meningkatnya koordinasi dan kolaborasi dalam pembangunan perumahan dan permukiman
- d. Komitmen Pemerintah Daerah yang tinggi dalam penyediaan layanan dasar
- e. meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam ikut serta membantu peningkatan kualitas perumahan
- f. Kemudahan berusaha melalui OSS dan teknologi informasi dalam mendorong peningkatan iklim usaha bidang penyediaan perumahan.

## 2. Tantangan Bidang Kawasan Permukiman :

- a. Penanganan Kawasan Kumuh masih menjadi isu sektoral, belum menjadi penanganan yang terintegrasi antar sektor.
- b. Ketidak teraturan penggunaan lahan terutama di kawasan bantaran sungai sehingga berpotensi menimbulkan kekumuhan baru.
- c. Penanganan kawasan kumuh tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga pemangku kepentingan lainnya, melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Sedangkan peluang yang ada pada bidang ini diantaranya meliputi :

- a. Peran masyarakat yang sangat antusias dalam penyediaan Sarana Prasarana dan Utilitas Permukiman.
- b. Banyaknya *stakeholders* yang terlibat dalam pembangunan terhadap peningkatan kualitas lingkungan
- c. Komitmen Daerah yang tinggi dalam penataan kawasan seiring dengan akselerasi percepatan pembangunan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat dan dinamikanya

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan umum terkait dengan penerapan SPM ini adalah pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, serta pelaksanaan pemenuhan pelayanan.

Masih banyaknya RTLH di Kabupaten Pati memerlukan kolaborasi dan peran serta dari berbagai sektor yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta (CSR). Selain itu backlog juga menjadi permasalahan yang harus mendapatkan perhatian. Sampai Tahun 2021, Kabupaten Pati masih menyisakan 78.108 backlog rumah, sehingga diperlukan peningkatan fasilitasi kepemilikan rumah dan penyediaan tanah untuk pembangunan rumah.

Berkaitan dengan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Pati, berdasarkan SK Bupati Pati Nomor 050/1783 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pati Nomor 050/4852 Tahun 2014 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pati, pada Tahun 2021 luas kawasan kumuh yang tersisa adalah 23,47 Ha. Namun kemudian pada Tahun 2021 dilaksanakan penyusunan SK Kumuh terbaru yang memasukkan kawasan kumuh yang sebelumnya belum teridentifikasi dalam SK Kumuh Tahun 2017 dan memasukkan luasan SK Kumuh Tahun 2017 yang masih tersisa. Berdasarkan SK Bupati Pati Nomor 050/3985 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pati, luas kawasan kumuh yang ditetapkan adalah 177,89 Ha. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Pati tersebut meliputi :

1. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
2. Peta Sebaran Delineasi Kumuh Kabupaten Pati.

Daftar Lokasi dan Peta Sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berada di 4 (empat) Desa Lokasi kumuh Lama dan 16 (enam belas) Desa Kumuh hasil pendataan baru yang secara keseluruhan terdiri 85 (delapan puluh) spot lokasi RT, yang berada di 20

(duapuluh) Desa di 7 (tujuh) Kecamatan, dengan luas total sebesar 177,89 (*seratus tujuh puluh tujuh koma delapan puluh sembilan*) hektar. Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, secara bersama-sama dan/ atau bersinergi dengan semua tingkatan pemerintahan, baik oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Pusat. Penetapan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ini selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) di Kabupaten Pati, guna mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebagaimana tabel 3.1 :

**Tabel 3.1**  
**DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**  
**DI KABUPATEN PATI TAHUN 2021**

No	NAMA LOKASI/ KAWASAN	LUAS (HA)		LINGKUP ADMINISTRATIF		
				RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN/ DISTRIK
1	Kawasan Juwana 16,73 ha	7,58	2,14	RT004-RW001	Bumirejo	Juwana
			2,99	RT005-RW001	Bumirejo	Juwana
			2,45	RT006-RW001	Bumirejo	Juwana
2		1,1	1,1	RT001-RW001	Kedungpancing	Juwana
3		5,19	2,27	RT003-RW002	Mintomulyo	Juwana
			2,92	RT004-RW002	Mintomulyo	Juwana
4		2,86	1,27	RT001-RW002	Growong Kidul	Juwana
			0,65	RT002-RW002	Growong Kidul	Juwana
			0,94	RT003-RW002	Growong Kidul	Juwana
5	Tambahharjo	21,39	1,48	RT001-RW003	Tambaharjo	Pati
			1,25	RT002-RW001	Tambaharjo	Pati
			3,12	RT003-RW003	Tambaharjo	Pati
			1,99	RT004-RW001	Tambaharjo	Pati
			6,43	RT004-RW003	Tambaharjo	Pati

			0,97	RT005-RW002	Tambaharjo	Pati
			3,05	RT006-RW001	Tambaharjo	Pati
			3,1	RT008-RW001	Tambaharjo	Pati
6	Plangitan	4,99	2,84	RT006-RW002	Plangitan	Pati
			2,15	RT010-RW002	Plangitan	Pati
7	Dengkek	11,26	4,92	RT001-RW001	Dengkek	Pati
			3,27	RT002-RW001	Dengkek	Pati
			3,07	RT003-RW001	Dengkek	Pati
8	Widorokandang	9,03	1,47	RT002-RW001	Widorokandang	Pati
			1,23	RT003-RW002	Widorokandang	Pati
			2,11	RT005-RW002	Widorokandang	Pati
			1,79	RT007-RW001	Widorokandang	Pati
			2,43	RT008-RW001	Widorokandang	Pati
9	Mulyoharjo	13,13	4,29	RT003-RW002	Mulyoharjo	Pati
			1,52	RT009-RW001	Mulyoharjo	Pati
			1,73	RT010-RW001	Mulyoharjo	Pati
			3,71	RT012-RW003	Mulyoharjo	Pati
			1,88	RT014-RW003	Mulyoharjo	Pati
10	Soneyan	7,02	1,28	RT001-RW001	Soneyan	Margoyoso
			1,31	RT001-RW002	Soneyan	Margoyoso
			1,13	RT001-RW003	Soneyan	Margoyoso
			1,52	RT002-RW002	Soneyan	Margoyoso
			1,78	RT002-RW003	Soneyan	Margoyoso
11	Pohijo	11,57	3,01	RT004-RW001	Pohijo	Margoyoso
			2,61	RT005-RW002	Pohijo	Margoyoso
			2,13	RT006-RW001	Pohijo	Margoyoso
			1,87	RT006-RW002	Pohijo	Margoyoso
			1,95	RT008-RW001	Pohijo	Margoyoso
12	Pondowan	13,12	4,55	RT001-RW001	Pondowan	Tayu

			2,05	RT001-RW004	Pondowan	Tayu
			2,53	RT003-RW003	Pondowan	Tayu
			1,59	RT003-RW004	Pondowan	Tayu
			2,4	RT004-RW003	Pondowan	Tayu
13	Tunggulsari	6,38	1,24	RT001-RW001	Tunggulsari	Tayu
			1,66	RT002-RW001	Tunggulsari	Tayu
			1,34	RT003-RW001	Tunggulsari	Tayu
			1,27	RT004-RW001	Tunggulsari	Tayu
			0,87	RT005-RW001	Tunggulsari	Tayu
14	Jepat Lor	10,52	1,53	RT001-RW001	Jepat Lor	Tayu
			1,65	RT001-RW004	Jepat Lor	Tayu
			1,96	RT002-RW001	Jepat Lor	Tayu
			1,66	RT002-RW005	Jepat Lor	Tayu
			1,27	RT003-RW002	Jepat Lor	Tayu
			1,23	RT004-RW005	Jepat Lor	Tayu
			1,22	RT005-RW005	Jepat Lor	Tayu
15	Pundenrejo	11,68	2,75	RT001-RW001	Pundenrejo	Tayu
			3,15	RT002-RW001	Pundenrejo	Tayu
			1,45	RT002-RW004	Pundenrejo	Tayu
			1,72	RT003-RW004	Pundenrejo	Tayu
			2,61	RT004-RW003	Pundenrejo	Tayu
16	Dororejo	8,98	1,68	RT001-RW001	Dororejo	Tayu
			1,14	RT001-RW002	Dororejo	Tayu
			1,44	RT002-RW001	Dororejo	Tayu
			1,15	RT002-RW002	Dororejo	Tayu
			1,03	RT003-RW001	Dororejo	Tayu
			1,68	RT003-RW002	Dororejo	Tayu
			0,86	RT005-RW001	Dororejo	Tayu
17	Kawasan Mbuloh	9,42	2,67	RT001-RW006	Kayen	Kayen
			2,75	RT004-RW006	Kayen	Kayen

			4	RT005-RW006	Kayen	Kayen
18	Banyutowo	10,09	0,93	RT001-RW002	Banyutowo	Dukuhseti
			1,39	RT002-RW002	Banyutowo	Dukuhseti
			2,49	RT005-RW001	Banyutowo	Dukuhseti
			2,54	RT005-RW002	Banyutowo	Dukuhseti
			2,73	RT006-RW001	Banyutowo	Dukuhseti
19	Puncel	10,36	1,53	RT001-RW005	Puncel	Dukuhseti
			1,05	RT002-RW005	Puncel	Dukuhseti
			2,42	RT004-RW005	Puncel	Dukuhseti
			5,36	RT004-RW006	Puncel	Dukuhseti
20	Pecangaan	2,23	1,15	RT001-RW001	Pecangaan	Batangan
			1,08	RT002-RW001	Pecangaan	Batangan
LOKASI		177,89	177,89	85 RT	20 DESA/KEL	7 KECAMATAN

Sumber : Disperkim 2022

Setelah mencermati uraian diatas, permasalahan pada urusan perumahan dan kawasan permukiman secara lebih detil adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2  
 Permasalahan Pembangunan Daerah  
 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih adanya masyarakat yang belum mampu menjangkau rumah layak huni dan kawasan permukiman yang layak	Kebutuhan terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman belum dapat diidentifikasi secara tepat	Data urusan perumahan dan kawasan permukiman yang belum terbaru
	Kualitas PSU perumahan yang menjadi rendah	Masih terdapat perumahan yang PSUnya belum diserahterimakan
		Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi terkait penerbitan Sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil
	Keberadaan dan tumbuhnya RTLH	Keterbatasan akses bagi MBR untuk memiliki rumah layak huni



		Kegiatan rehabilitasi rumah layak huni masih minim
	Ada kawasan permukiman yang tidak dilengkapi dengan PSU yang layak	Perkembangan beberapa kawasan permukiman dan perumahan tidak disertai pembangunan PSU yang sesuai standar
		Belum adanya peraturan di daerah yang mengatur tentang kasiba/lisiba
	Masih adanya kawasan permukiman kumuh	Penanganan kawasan kumuh belum optimal
		Kurangnya sinergitas antar sektor dalam penanganan kawasan kumuh
	Penanganan rumah rusak akibat korban bencana belum optimal	Kurangnya koordinasi terkait penanganan rumah korban bencana

Sumber : Disperkim 2022

3.2    **Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah dalam RPD**

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati menetapkan tujuan yang merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2023-2026 sebagai berikut :

1. Menguatnya pertumbuhan ekonomi berkualitas, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
  - 1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Utama (Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan)
  - 1.2 Meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat
  - 1.3 Menguatnya infrastruktur wilayah
  - 1.4 Menurunnya Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat
  - 1.5 Meningkatnya Kondusifitas wilayah
  - 1.6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Menurunnya pengangguran, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
  - 2.1 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
  - 2.2 Meningkatnya kesempatan atau peluang kerja
3. Menurunnya tingkat kemiskinan, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
  - 3.1 Menurunnya kesenjangan antar penduduk miskin
  - 3.2 Meningkatnya Akses Pelayanan Dasar
4. Meningkatnya kualitas hidup penduduk, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
  - 4.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
  - 4.2 Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan
  - 4.3 Meningkatnya standar hidup masyarakat
5. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu

Meningkatnya kesetaraan dan kualitas hidup penduduk laki-laki dan perempuan

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
  - 6.1 Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan publik
  - 6.2 Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten
  - 6.3 Meningkatkan Kemandirian fiskal daerah

Diharapkan dalam rencana pembangunan empat tahun kedepan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat mendukung pencapaian tujuan ke tiga dalam RPD Kabupaten Pati 2023 – 2026 Menurunnya tingkat kemiskinan khususnya pada sasaran meningkatnya akses pelayanan dasar dengan indikator kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau sebesar 96,70 diakhir tahun 2026.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Jawa Tengah Telaahan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024**

Dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2020 – 2024 telah ditetapkan Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategis. Tujuan yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatkan Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:

1. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
2. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni

*Smart living* yang tertuang dalam Visium Kementerian PUPR dimaknai sebagai permukiman cerdas. Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan smart living adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. Kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut, meliputi:

- a. Membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas, yang andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan gender),

berkelanjutan, serta bersifat *return of investment*, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

- b. Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur permukiman.
- c. Menerapkan inovasi terbaru dan/atau tepat guna dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan perumahan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah
- b. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah
- c. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif.

#### **Telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023**

Dalam dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Tahun 2018 – 2023 yang mempunyai keterkaitan dengan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat Kabupaten sebagai berikut :

1. Tujuan  
Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas.
2. Sasaran
  1. Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan Masyarakat Yang Memiliki Keterbatasan Akses Pembiayaan Perumahan
  2. Meningkatnya kualitas kawasan permukimanStrategi sasaran 1 :
  1. Peningkatan rumah menjadi layak huni, sehat dan berwawasan lingkungan
  2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan
  3. Peningkatan kapasitas SDM penyelenggaraan perumahanArah Kebijakannya adalah :
  1. Peningkatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
  2. Penanganan rumah menuju sehat dan berwawasan lingkungan
  3. Fasilitasi Penyediaan rumah bagi korban bencana alam dan program pembangunan
  4. Fasilitasi Penyediaan rumah bagi korban bencana alam dan program pembangunan

5. Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan
6. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan

Strategi sasaran 2 :

1. Pengurangan Kawasan Kumuh :
2. Pengembangan PSU
3. Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan permukiman
4. Peningkatan keterpaduan penyelenggaraan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

Arah Kebijakannya adalah :

1. Penanganan Kawasan Kumuh Provinsi
2. Peningkatan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman
3. Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan permukiman
4. Pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
5. Pembinaan dan evaluasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
6. Meningkatkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Telaah RTRW diperlukan dalam penentuan isu strategis guna penetapan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh perangkat daerah. Tujuan RTRW Kabupaten Pati 2011-2031, yaitu terwujudnya Kabupaten Pati sebagai Bumi Mina Tani, berbasis keunggulan pertanian dan industri yang berkelanjutan. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk meminimalisir terjadinya krisis tata ruang. Penataan ruang yang baik perlu memperhatikan keterhubungan antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

Salah satu strategi dalam RTRW Kabupaten Pati 2011-2031 yang berkaitan dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah strategi pengembangan kawasan permukiman melalui menyediakan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan serta mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas permukiman.

Rencana pola ruang pada kawasan budidaya khususnya kawasan permukiman di Kabupaten Pati terdiri atas :

1. Kawasan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 12.165 (dua belas ribu seratus enam puluh lima) hektar berada di seluruh kecamatan wilayah Daerah.
2. Kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 23.295 (dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima) hektar berada di seluruh kecamatan wilayah Daerah.

### 3.5 Isu Strategis Perangkat Daerah

#### ➤ **Isu Internasional**

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia yang disepakati oleh berbagai negara dalam forum resolusi PBB. SDGs ini mempunyai 17 tujuan dengan 169 target yang terukur sampai dengan tahun 2030. Salah satu tujuan dari implementasi SDGs yang berkaitan dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

#### ➤ **Isu Nasional di dalam RPJMN 2020-2024**

Isu strategis nasional tidak lepas dari Arahan Presiden Republik Indonesia sebagai dasar penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024, yang diinstrumentasikan ke dalam 7 Agenda Pembangunan. Agenda yang berkaitan dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing melalui Pengentasan kemiskinan.

Isu strategis utama yang akan dihadapi dalam pembangunan infrastruktur permukiman pada tahun 2020-2024, yakni kurang komprehensifnya pembangunan dalam meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur permukiman.

#### ➤ **Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah di dalam RPJMD 2018-2023**

Isu strategis Provinsi Jawa Tengah di dalam RPJMD 2018-2023 yaitu:

1. Penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha
4. Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam
5. Kedaulatan pangan dan energy
6. Kesenjangan wilayah
7. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

#### ➤ **Isu Strategis Kabupaten Pati di dalam RPD 2023 - 2026**

Isu – isu strategis Kabupaten Pati yang ditetapkan di dalam RPD 2023 – 2026 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan menekankan pada pemerataan berbasis kelestarian lingkungan

2. Penurunan kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin
3. Peningkatan kualitas SDM dengan menekankan peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi masyarakat
4. Tata kelola pemerintah dengan menekankan kepada penguatan birokrasi dan peningkatan akses serta kualitas layanan publik

### **Penetapan Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati**

Memperhatikan perkembangan isu – isu strategis di tingkat internasional, nasional, provinsi maupun daerah, dapat diketahui bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang harus diselesaikan. Kemiskinan merupakan isu multidimensional sehingga penyelesaiannya membutuhkan sinergi berbagai sektor dan kerjasama semua pemangku kepentingan. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2020 telah meningkatkan jumlah penduduk miskin serta kelompok rentan yang termasuk dalam penerima manfaat kesejahteraan sosial (PMKS).

Selain itu, kesenjangan antar kelompok pendapatan juga semakin melebar. Permasalahan kemiskinan tersebut selanjutnya berpotensi menyebabkan penurunan kualitas lingkungan tempat tinggal, seperti rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh. Masalah utama dalam penanganan kemiskinan adalah keterbatasan pemenuhan layanan dasar bagi penduduk miskin serta kapasitas penduduk miskin yang relatif masih rendah. Kondisi tersebut diantaranya disebabkan oleh ketersediaan data kemiskinan yang valid dan terbaru serta penanganan kemiskinan yang belum terintegrasi. Kerjasama dengan pihak ketiga, diantaranya melalui CSR untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dalam penanganan kemiskinan perlu dilakukan, namun hal tersebut belum berjalan secara optimal. Selain itu, Kabupaten Pati memiliki jumlah desa yang cukup banyak, namun partisipasi desa dalam pengentasan kemiskinan belum optimal. Kondisi ini diantaranya disebabkan oleh masih lemahnya pemberdayaan masyarakat desa khususnya pada aspek ekonomi belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Telaah Renstra K/L, Telaah Renstra PD Provinsi Jawa Tengah, Telaah RTRW dan penentuan isu – isu strategis baik isu internasional, isu nasional, isu strategis Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 dan isu strategis Kabupaten Pati dalam RPD 2023-2026, maka isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan adalah ***Penyediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang layak bagi seluruh masyarakat.***

# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 Menurunnya Tingkat Kemiskinan dengan sasaran meningkatnya akses pelayanan dasar dengan indikator sasaran persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode 2023-2026 telah menetapkan satu tujuan yang telah dirumuskan yaitu Peningkatan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang layak huni bagi seluruh masyarakat.

Tujuan tersebut akan dicapai melalui 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Penyediaan rumah layak huni
2. Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni dan,
3. Pengurangan Kawasan Kumuh

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana tabel 4.1:

Tabel 4.1  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati

No .	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			
				I	II	III	IV
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang layak huni bagi seluruh masyarakat		1. Persentase rumah layak huni	94,61	94,89	95,17	95,45
			2. Persentase kawasan permukiman yang layak huni	99,17	99,23	99,28	99,33
		Penyediaan rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni yang disediakan	220	230	240	250
		Pengurangan rumah tidak layak huni	Jumlah RTLH yang direhab	6.926	7.961	8.996	10.031
		Pengurangan Kawasan kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	159,17	149,17	139,17	129,84

Sumber : Disperkim 2022



Sebagaimana terlihat dalam Tabel di atas, tujuan yang ingin dicapai pada posisi akhir empat tahun Perencanaan Strategis 2023-2026 oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah “Peningkatan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang layak huni bagi seluruh masyarakat”.

Tujuan ini fokus pada kawasan kumuh yang belum ditangani dan masih banyaknya RTLH yang belum ditingkatkan kualitasnya. Adapun indikator tujuan yang ditetapkan adalah persentase rumah layak huni dan persentase kawasan permukiman yang layak huni. Selanjutnya indikator tujuan ditentukan 3 (tiga) sasaran yaitu penyediaan rumah layak huni, pengurangan rumah tidak layak huni dan pengurangan kawasan kumuh.

Persentase rumah layak huni dihitung dari jumlah rumah layak huni dibandingkan dengan keseluruhan jumlah rumah yang ada di Kabupaten Pati dalam data awal Tahun 2021 sebanyak 371.378 unit. Dengan kondisi awal persentase rumah layak huni sebesar 94,33% serta target rata-rata hasil penanganan rumah layak huni setiap tahun sebanyak 1.035 unit atau 4,92% diharapkan kondisi akhir tahun 2026 persentase rumah layak huni akan meningkat menjadi 95,45%.

Persentase kawasan permukiman yang layak huni dihitung dari luas kawasan permukiman yang layak dibandingkan dengan keseluruhan luas kawasan permukiman di Kabupaten Pati dalam data awal Tahun 2021 sebanyak 19.896,97 Ha. Kawasan permukiman yang layak dihitung dari luas kawasan permukiman dikurangi sisa luasan kumuh. Sebagaimana diketahui bahwa dengan penetapan SK Kumuh pada Tahun 2021 seluas 177, 89 Ha, maka kondisi awal persentase kawasan permukiman yang layak huni sebesar 99,11% atau seluas 19.719,08 Ha. Diharapkan dalam kurun waktu 2023-2026 luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang merupakan kewenangan kabupaten dapat ditangani sebanyak 43,72 Ha sehingga kondisi akhir pada tahun 2026 persentase kawasan permukiman yang layak huni akan bertambah menjadi 99,33% atau 19.762,80 Ha.

Sasaran pertama penyediaan rumah layak huni dengan indikator jumlah rumah layak huni yang disediakan dihitung dari jumlah rumah baru yang layak huni yang disediakan oleh pengembang maupun swadaya masyarakat. Target penyediaan sampai dengan akhir periode sebanyak 940 unit. Diharapkan dengan adanya penyediaan rumah layak huni oleh pengembang maupun swadaya masyarakat ini dapat mengurangi jumlah backlog.

Sasaran kedua pengurangan rumah tidak layak huni dengan indikator jumlah rumah tidak layak huni yang direhab dihitung dari jumlah penanganan RTLH baik peningkatan kualitas maupun pembangunan baru RTLH dari berbagai sumber dana yang dilaksanakan di Kabupaten Pati. Target yang ditetapkan merupakan akumulasi perhitungan penanganan tahun sebelumnya. Kondisi awal



Tahun 2021 jumlah penanganan RTLH dari berbagai sumber tercatat sebanyak 3.682 unit. Target yang diharapkan pada akhir periode jumlah RTLH di Kabupaten Pati akan berkurang sebanyak 10.031 unit.

Sasaran ketiga pengurangan kawasan kumuh dengan indikator luas kawasan permukiman kumuh merupakan sisa luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Bupati Pati Tahun 2021 yang belum ditangani. Kondisi akhir yang diharapkan setelah penanganan kumuh yang merupakan kewenangan kabupaten selesai, maka sisa Luas Kawasan Permukiman Kumuh akan berkurang menjadi 129,84 Ha.

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Perumusan strategi dan arah kebijakan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati selaras dengan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Pati. Perumusan strategi dan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Uraian terkait dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan PD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Peningkatan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang layak huni bagi seluruh masyarakat	Penyediaan rumah layak huni	<div>✓ Peningkatan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau</div> <div>✓ Peningkatan akses layanan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</div> <div>✓ Peningkatan Akses layanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman</div>	<div>✓ Pengoptimalan Pemanfaatan Rumah Susun</div> <div>✓ Peningkatan koordinasi dalam rangka Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</div> <div>✓ Peningkatan pengawasan penyelenggaraan PSU perumahan oleh Pengembang</div> <div>✓ Peningkatan kualitas PSU perumahan yang telah diserahterimakan</div> <div>✓ Optimalisasi layanan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil</div>

	Pengurangan RTLH	✓ Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	✓ Peningkatan Kolaborasi antar sektor dalam rangka rehabilitasi rumah layak huni
	Pengurangan Kawasan Kumuh	✓ Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	✓ Peningkatan kolaborasi antar sektor dalam penanganan permukiman kumuh

Sumber : Disperkim, 2022

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, disusun program dan kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati. Pada bidang umum dan kesekretariatan, prioritas program dan kegiatan difokuskan pada pembenahan kinerja layanan, termasuk sistem pelaporan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Pada bidang Perumahan dan Bidang Kawasan Permukiman prioritas program dan kegiatan berfokus pada penyediaan rumah layak huni, penataan kawasan kumuh, penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU) perumahan, serta Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman skala Kabupaten serta pada UPT Rumah Susun fokus pada pengelolaan Rusunawa. Selain program dan kegiatan prioritas tersebut, program dan kegiatan rutin yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga tetap menjadi bagian dalam penyusunan rencana strategis (renstra). Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 6.1  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PATI

Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perang kat Daerah Penang gung-jawab
		Urusan	Bidang Urusan/Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
											2023		2024		2025		2026				
											Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		X																			
		X	XX																		
		X	XX	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	3.448.000	100	3.500.061	100	3.536.632	100	3.559.923	100	14.044.616	
		X	XX	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokume n	6	6	11.000	6	11.000	6	11.000	6	11.000	24	44.000	
		X	XX	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokume n	2	2	3.000	2	3.000	2	3.000	2	3.000	8	12.000	
		X	XX	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokume n	1	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	4	8.000	

		X	XX	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	8	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	4	8.000	
		X	XX	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	1	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	4	8.000	
		X	XX	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	1	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	4	8.000	
		X	XX	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen	4	4	2.447.000	4	2.472.000	4	2.502.000	4	2.532.000	16	9.953.000	
		X	XX	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	25	25	2.400.000	25	2.420.000	25	2.450.000	25	2.480.000	100	9.750.000	
		X	XX	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	8	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	4	40.000	
		X	XX	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	1	33.000	1	38.000	1	38.000	1	38.000	4	147.000	

		X	XX	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	1	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	4	8.000	
		X	XX	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	1	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	4	8.000	
		X	XX	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Barang Milik Daerah	dokumen	1	1	25.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	4	115.000	
		X	XX	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	dokumen	1	1	25.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	4	115.000	
		X	XX	01	204		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	dokumen	1	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	4	8.000	
		X	XX	01	204	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen	1	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	4	8.000	
		X	XX	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	dokumen	1	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	4	120.000	
		X	XX	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	50	50	20.000	50	20.000	50	20.000	50	20.000	200	80.000	
		X	XX	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	paket	1	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	4	40.000	

		X	XX	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	paket	7	7	245.000	7	256.000	7	256.000	7	256.000	28	1.013.000	
		X	XX	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	12	5.000	12	5.000	12	5.000	12	5.000	48	20.000	
		X	XX	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	12	6.000	12	6.000	12	6.000	12	6.000	48	24.000	
		X	XX	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	12	140.000	12	150.000	12	150.000	12	150.000	48	590.000	
		X	XX	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	12	24.000	12	25.000	12	25.000	12	25.000	48	99.000	
		X	XX	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	12	12	3.000	12	3.000	12	3.000	12	3.000	48	12.000	
		X	XX	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	65.000	12	65.000	12	65.000	12	65.000	48	260.000	
		X	XX	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	4	8.000	
		X	XX	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	dokumen	-	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	4	80.000	



		X	XX	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	-	1	20.000	-	-	1	20.000	-	-	2	40.000	
		X	XX	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-	-	1	20.000	-	-	1	20.000	2	40.000	
		X	XX	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dokumen	3	3	593.000	3	593.000	3	593.000	3	593.000	12	2.372.000	
		X	XX	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	3.000	12	3.000	12	3.000	12	3.000	48	12.000	
		X	XX	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	90.000	12	90.000	12	90.000	12	90.000	48	360.000	
		X	XX	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	48	2.000.000	
		X	XX	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dokumen	2	2	75.000	2	86.061	2	92.632	2	85.923	8	339.616	
		X	XX	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	22	22	45.000	22	45.000	22	45.000	22	45.000	88	180.000	

		X	XX	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	30.000	1	41.061	1	47.632	1	40.923	4	159.616	
Peningkatan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang layak huni bagi seluruh masyarakat	Penyediaan rumah layak huni	1	4	2			Program Pengembangan Perumahan	Persentase pembangunan/rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	%	100	100	250.000	100	210.000	100	220.000	100	220.000	100	900.000	Disperkim
								Persentase pembangunan rumah layak huni bagi terdampak relokasi program kabupaten/kota	%	100	100	500.000	100	520.000	100	535.000	100	550.000	100	2.105.000	
		1	04	02	201		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	rumah	125	125	150.000	125	140.000	125	140.000	125	140.000	125	570.000	
		1	04	02	201	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	120.000	
		1	04	02	201	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	dokumen	1	1	35.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	125.000	

	1	04	02	201	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	dokumen	1	1	35.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	125.000	
	1	04	02	201	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	dokumen	1	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	200.000	
	1	04	02	203		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	unit rumah												
	1	04	02	203	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	unit rumah												
	1	04	02	203	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	unit rumah												
	1	04	02	205		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau F27au Rumah Khusus	Jumlah rumah susun yang dikelola	rumah susun	1	1	500.000	1	520.000	1	535.000	1	550.000	1	2.105.000	
	1	04	02	205	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	dokumen	1	1	500.000	1	520.000	1	535.000	1	550.000	1	2.105.000	

	1	04	02	206		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah perumahan yang berizin	unit perumahan	2	2	70.000	2	40.000	2	50.000	2	50.000	4	210.000	
	1	04	02	206	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	6	2	20.000	2	40.000	2	50.000	2	50.000	8	160.000	
	1	04	02	206	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	3	3	50.000	3	50.000	3	50.000	3	50.000	3	200.000	
Pengurangan Kawasan Kumuh	1	4	3			Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha	%	24,92	16	3.200.000	11	3.300.000	5	3.375.300	0	3.440.000	0	13.315.300	Disperkim
	1	04	03	202		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	hektar (Ha)	44,33	29,33	195.000	19,33	225.000	9,33	355.000	0	125.000	0	900.000	
	1	04	03	202	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	0	-	-	0	1	100.000	-	-	1	100.000	

	1	04	03	202	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	1	100.000	1	150.000	1	100.000	0	0	1	350.000	
	1	04	03	202	03	Pembentukan/Pe mbinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan	0	1	15.000	-	0	1	20.000	1	30.000	1	65.000	
	1	04	03	202	04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	0	1	30.000	1	25.000	1	35.000	1	35.000	1	125.000	
	1	04	03	202	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Pere majaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Perem ajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	60.000	1	210.000	
	1	04	03	202	08	Penyusunan/Revi ew/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terevie w/Terlegalisasi	dokume n	1	0	-	-	-	1	50.000	-	-	1	50.000	
	1	04	03	203		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	unit RTLH	40	100	3.005.000	100	3.075.000	100	3.020.300	100	3.315.000	400	12.415.300	

	1	04	03	203	01	Penyusunan Rencana Tapak ( <i>Site Plan</i> ) dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak ( <i>Site Plan</i> ) dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	dokumen	1	1	50.000	1	100.000	-	-	-	-	2	150.000	
	1	04	03	203	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	unit rumah	40	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.175.000	400	8.175.000	
	1	04	03	203	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dokumen	1	0	-	1	20.000	1	20.000	1	25.000	1	65.000	
	1	04	03	203	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1	1	20.000	1	20000	1	30000	1	30000	1	100.000	
	1	04	03	203	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	hektar (Ha)	8,72	10	615.000	10	615.000	10	645.300	9,33	750.000	39,33	2.625.300	
	1	04	03	203	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	1	1	20.000	1	20.000	1	25.000	1	35.000	1	100.000	
	1	04	03	203	08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	unit rumah	0	6	300.000	6	300.000	6	300.000	6	300.000	24	1.200.000	

		1	4	4			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH diluar kawasan kumuh yang ditangani	%	15,98	20,98	750.000	25,98	760.000	30,98	774.400	35,98	800.000	5%	3.084.400	Disperkim
Pengurangan rumah tidak layak huni		1	04	04	201		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	unit RTLH	3069	935	750.000	935	750.000	935	750.000	935	750.000	3740	3.000.000	
		1	04	04	201	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	unit rumah	30	35	600.000	35	600.000	35	600.000	35	600.000	140	600.000	
		1	04	04	201	2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah <b>Dokumen Kesepakatan Kerja Sama</b> dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	dokumen	1	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	600.000	

Penyediaan rumah layak huni	1	4	5			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) yang kondisinya baik	Lokasi	33	37	1.073.000	39	1.130.000	41	1.120.300	43	1.150.000	43	4.473.300	Disperkim
	1	04	05	201		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	unit perumahan	58	58	1.073.000	58	1.130.000	58	1.120.300	58	1.150.000	58	4.473.300	
	1	04	05	201	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	dokumen	0	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	8	400.000	
	1	04	05	201	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	lokasi	7	7	700.000	7	750.000	7	770.000	7	800.000	28	700.000	
	1	04	05	201	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	1	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	4	700.000	
	1	04	05	201	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Laporan	5	5	50.000	5	50.000	5	30.000	5	27.000	5	700.000	
	1	04	05	201	05	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	dokumen	38	5	23.000	5	30.000	5	20.300	5	23.000	20	700.000	



	Penyedi aan rumah layak huni	1	4	6			Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Pengembang Perumahan yang telah memiliki sertifikasi dan registrasi	%	36	50	100.00 0	64	95.000	81	98.800	100	98.500	100 %	392.300	Disperk im
		1	04	06	201		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	pengem bang	15	21	100.00 0	217	100.00 0	34	100.00 0	42	100.00 0	42	400.000	
		1	04	06	201	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan	0	1	100.00 0	1	100.00 0	1	100.00 0	1	100.00 0	4	400.000	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran PD, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menetapkan target pada masing – masing indikator kinerja baik indikator tujuan maupun indikator sasaran. Program dan kegiatan baik yang bersifat regular maupun prioritas akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pati selama 4 (empat) tahun ke depan. Program prioritas yang direncanakan sesuai dengan bidang urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu :

- 1. Program Pengembangan Perumahan
- 2. Program Kawasan Permukiman
- 3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- 4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- 5. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Adapun indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Formula	Kondisi Kinerja pada Kondisi Kinerja pada Tahun 0 (tahun 2021)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
A	TUJUAN							
	Peningkatan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang layak huni bagi seluruh masyarakat							
1	Indikator Tujuan							
	1. Persentase rumah layak huni	(Jumlah rumah yang layak huni dibagi Jumlah keseluruhan rumah) x 100%	94,33	94,61	94,89	95,17	95,45	95,45

	2. Persentase kawasan permukiman yang layak huni	(Luas kawasan yang layak dibagi luas kawasan permukiman) x 100%	99,11	99,17	99,23	99,28	99,33	99,33
B	SASARAN							
1	Penyediaan rumah layak huni							
	Indikator Sasaran							
	1. Jumlah rumah layak huni yang disediakan (data pembangunan rumah baru oleh pengembang /swadaya)	Jumlah rumah baru layak huni yang disediakan (data pembangunan rumah baru oleh pengembang /swadaya)	214	220	230	240	250	940
2	Pengurangan rumah tidak layak huni							
	Indikator Sasaran							
	1. Jumlah RTLH yang direhab	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab (akumulasi)	3.682	6.926	7.921	8.996	10.031	10.031
3	Pengurangan kawasan kumuh							
	Indikator Sasaran							
	1. Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah sisa luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Bupati Pati Tahun 2021 yang belum ditangani	174,17	159,17	149,17	139,17	129,84	129,84
C	PROGRAM/ INDIKATOR							
	Program Pengembangan Perumahan							
	1). Persentase Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana	(Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana dibagi Jumlah Kebutuhan Pembangunan/Rehabilitasi	100	100	100	100	100	100

		si) X 100%						
	2). Persentase pembangunan rumah layak huni bagi terdampak relokasi program kabupaten/kota dibagi Jumlah kebutuhan penyediaan ) X 100%	(Jumlah penyediaan rumah layak huni bagi terdampak relokasi program kabupaten/kota dibagi Jumlah kebutuhan penyediaan ) X 100%	100	100	100	100	100	100
	Program Kawasan Permukiman							
	- Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha	(Sisa Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang belum ditangani dibagi Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha) x 100%	24,92	16,0	11,0	5	0	0
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh							
	- Persentase RTLH diluar kawasan kumuh yang ditangani	(jumlah RTLH diluar kawasan kumuh yang ditangani dibagi Jumlah RTLH diluar kaw.kumuh ) x 100%	15,98	20,98	25,98	30,98	35,98	35,98
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)							
	- Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum) yang	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU yang kondisinya baik ditambah jumlah permukiman /kelurahan	33	37	39	41	43	43

	kondisin ya baik							
	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman							
	- Persenta se pengemb ang perumah an yang telah memiliki sertifika si dan registras i	(jumlah pengembang perumahan yang telah memiliki sertifikasi dan registrasi dibagi jumlah pengembang di kabupaten) x 100%	36	50	64	81	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Disperkim Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 4 (empat) tahun mendatang. Renstra Disperkim Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Disperkim Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Disperkim Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Disperkim Kabupaten Pati mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026;
2. Renstra Disperkim Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Disperkim Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program.

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRWANTO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670911 198607 1 001